



Komunikasi Risiko Sebagai Upaya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Aceh Barat

Indah Fadila*¹, Dwi Sadono², Annisa Utami Seminar³

^{1,2,3}Institute Pertanian Bogor, Indonesia

*Corresponding author

E-mail addresses: iindahfadila@apps.ipb.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received December 27, 2025

Revised February 28, 2026

Accepted April 03, 2026

Available online April 03, 2026

Kata Kunci:

Komunikasi risiko; Karhutla; Pemangku kepentingan; Pencegahan bencana; Aceh Barat.

Keywords:

Risk communication; Forest and land fires; Stakeholders; Disaster prevention; Aceh Barat.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license. Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Sagita Akademia Maju.

ABSTRAK

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi permasalahan lingkungan yang berulang di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Upaya pencegahan karhutla tidak hanya bergantung pada aspek teknis pemadaman, tetapi juga pada efektivitas komunikasi risiko antar pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemaknaan karhutla oleh para aktor, praktik komunikasi risiko dalam upaya pencegahan karhutla, serta kesenjangan peran dan persepsi antar stakeholder di Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam semi-terstruktur, dan dokumentasi terhadap berbagai aktor, antara lain Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kesatuan Pengelolaan Hutan, Manggala Agni, BPBD, TNI/Polri, perusahaan pemegang konsesi, dan Masyarakat Peduli Api (MPA). Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis percakapan (conversation analysis) dengan bantuan perangkat lunak NVivo 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi risiko dalam pencegahan karhutla telah berlangsung melalui berbagai saluran formal dan informal, namun belum

sepenuhnya menghasilkan kesepakatan bersama antar aktor. Perbedaan pemaknaan risiko, keterbatasan koordinasi, serta ketimpangan peran antar-stakeholder menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pencegahan karhutla. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan komunikasi risiko yang bersifat partisipatif, interaktif, dan berorientasi pada pencegahan sebagai strategi utama pengendalian karhutla.

ABSTRACT

Forest and land fires remain a recurring environmental issue in Aceh Province, particularly in West Aceh Regency. Fire prevention efforts rely not only on technical firefighting measures but also on the effectiveness of risk communication among stakeholders. This study aimed to analyze stakeholders' perceptions of forest and land fires, risk communication practices in fire prevention, and gaps in roles and perceptions among stakeholders in West Aceh Regency. This research employed a qualitative case study approach. Data were collected through field observations, semi-structured in-depth interviews, and documentation involving key stakeholders, including environmental agencies, forest management units, disaster management authorities, security forces, concession companies, and community-based fire prevention groups. Data analysis was conducted using conversation analysis supported by NVivo 12 software. The findings revealed that risk communication practices have been implemented through various formal and informal channels but have not fully fostered shared understanding among stakeholders. Differences in risk perception, limited coordination, and role disparities remain significant barriers to effective fire prevention. This study highlights the need for participatory and interactive risk communication strategies focused on prevention to strengthen forest and land fire management.

1. PENDAHULUAN

Kasus kebakaran hutan di Indonesia sudah terjadi sejak dahulu, tercatat terjadi sejak tahun 1970-an. Penyebab terjadinya karhutla ini umumnya bersumber dari faktor kesengajaan masyarakat yang membuka lahan dengan membakar hutan, membiarkan sisa pembakaran dari api unggun yang dibuat oleh para pemburu, hingga membuang puntung rokok sembarangan di sekitar hutan yang menjadi penyebab timbulnya api. Sebagai salah satu wilayah dengan kekayaan hutan tropisnya, Provinsi Aceh kerap menghadapi permasalahan kebakaran hutan dan lahan, terutama di musim kemarau. Karhutla di Aceh seringkali dipicu oleh berbagai faktor, baik faktor yang tidak disengaja seperti faktor alam maupun faktor yang disengaja oleh ulah manusia. Faktor alam dapat menyebabkan karhutla seperti cuaca panas yang ekstrem dan kekeringan yang berkepanjangan sehingga mempercepat penyebaran api. Namun, faktor kesengajaan oleh manusia lebih sering menjadi penyebab utama terjadinya kasus kebakaran hutan dan lahan, seperti pembukaan lahan menggunakan cara membakar dengan sengaja, perambahan hutan, hingga faktor kelalaian dalam mengelola lahan perkebunan.

Meskipun skala karhutla yang terjadi tidak sebesar di Provinsi lain di Indonesia seperti Riau atau Kalimantan Tengah, Provinsi Aceh tetap termasuk dalam wilayah rawan karhutla, terutama pada musim kemarau. Maraknya pembukaan lahan dengan cara membakar mulai terjadi sejak tahun 1990an di Provinsi Aceh, terutama di wilayah dataran rendah dan lahan gambut di Aceh bagian barat dan tenggara. Kabupaten Aceh Barat menjadi salah satu wilayah di Provinsi Aceh yang sering mengalami kebakaran hutan dan lahan. Hal ini didukung dengan kondisi wilayah Kabupaten Aceh Barat yang memiliki lahan gambut yang rentan terbakar. Kebakaran lahan gambut didaerah ini menjadi masalah serius karena sifat lahan gambut yang mudah terbakar, serta kesulitan dalam pemadaman api karena bara api yang dapat bertahan didalam tanah gambut untuk waktu yang lama. Diketahui lahan gambut di Aceh Barat memiliki kedalaman bervariasi, mulai dari dangkal (kurang dari 1 meter) hingga dalam (lebih dari 3 meter) (Wahyudi et al. 2023). Lahan gambut ini terbentuk dari akumulasi bahan organik yang membusuk selama ribuan tahun dalam kondisi tergenang air, sehingga saat lahan ini dikeringkan untuk kepentingan perkebunan atau pembangunan, lahan gambut menjadi sangat rentan terhadap kebakaran karena memiliki kandungan karbon yang tinggi (Virmanto 2022). Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Aceh Barat berbatasan dengan Kabupaten Pidie dan Aceh Jaya disebelah utara, kemudian berbatasan dengan Kabupaten Nagan Raya dan Samudera Indonesia disebelah selatannya (BPS Aceh Barat 2024). Secara astronomis Kabupaten Aceh Barat terletak antara 04o06' - 04o47' Lintang Utara dan 95o52' - 96o30' Bujur Timur dengan luas 292.795 ha dan memiliki 12 kecamatan dan 321 desa didalamnya.

Jumlah kasus karhutla di Kabupaten Aceh Barat mulai meningkat pada tahun 2009-2012 seiring ekspansi perkebunan sawit dan karet. Pembukaan lahan untuk kebutuhan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri (HTI) ini dilakukan baik oleh konsesi hutan, oknum maupun masyarakat yang membuka lahan dengan cara tebang bakar (slash and burn) menyebabkan kasus karhutla yang tak kunjung reda.

Berdasarkan laporan oleh Sigit (2016) setiap tahunnya pada provinsi-provinsi di Indonesia yang memiliki lahan gambut pasti mengalami kebakaran, diikuti dengan kejadian pada tahun 2015 yang menjadi salah satu tahun terparah secara nasional, karhutla terjadi dalam eskalasi besar, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Akibat fenomena El Nino, kemarau panjang dan praktek deforestasi yang masih melalui sistem pembakaran lahan menyebabkan terdapat puluhan titik panas (hotspot) di Aceh Barat, meskipun tidak separah di Riau dan Kalimantan.

Kebakaran dalam skala yang cukup luas juga kembali terjadi di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017. Karhutla yang terjadi pada lahan gambut seluas puluhan hektare diketahui terjadi karena pembukaan lahan untuk perkebunan dengan cara dibakar. Kebakaran ini terpantau terjadi di enam kecamatan yaitu Woyla, Meureubo, Sama Tiga, Johan Pahlawan, Arongan Lambalek dan Kaway XVI. Pada situs harian mongabay, Yusmadi selaku kepala BPBA menyebutkan api muncul karena pembersihan lahan yang dilakukan masyarakat dengan cara dibakar, pada 18 Juli 2017. Musim kemarau kemudian menyebabkan api dengan mudahnya menyebar ke daerah lain secara cepat (Rahmadi 2017). Yusmadi kemudian melanjutkan pemadaman sulit dilakukan karena akses jalur masuk ke lokasi yang terbatas, sumber air jauh, dan koordinasi dengan lembaga yang secara aturan menjadi leading sektor penanganan karhutla sesuai dengan Permen LHK No.32 Tahun 2016 tidak terlihat. Berdasarkan Permen LHK No. 32 Tahun 2016 ini disebutkan salah satu lembaga yang harusnya terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran di wilayah sekitar hutan/lahan adalah kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), namun pada tahun 2017 ini Kabupaten Aceh Barat belum memiliki kelompok MPA. Padahal kasus karhutla yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 ini merupakan kasus yang cukup berdampak bagi masyarakat. Kabut asap tebal timbul akibat kebakaran yang cukup besar pada tahun ini menyebabkan banyak masyarakat mengalami gangguan pernafasan. Masriadi (2017) dalam harian kompas juga memberitakan bahwa kabut asap dari kebakaran di Kabupaten Aceh Barat ini menyebar sampai ke wilayah kota Lhokseumawe yang berjarak 287 km dari lokasi kebakaran. Kabut asap ini juga menyebabkan menurunnya jarak pandang di kawasan terdampak.

Landasan Teori

Karhutla merupakan bentuk risiko lingkungan yang bersumber dari interaksi faktor alam dan aktivitas manusia. Dalam konteks penanggulangan bencana, komunikasi risiko menjadi pendekatan penting untuk membangun kesadaran, pemahaman, dan kesiapsiagaan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan komunikasi risiko untuk menganalisis bagaimana karhutla dimaknai oleh para stakeholder serta bagaimana praktik komunikasi risiko dijalankan dalam upaya pencegahan. Fokus diarahkan pada identifikasi pola komunikasi, peran aktor, media yang digunakan, serta bentuk kesenjangan pemahaman dan koordinasi yang terjadi. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi dasar perumusan sistem komunikasi risiko yang lebih konvergen, partisipatif, dan berorientasi pada pencegahan.

Pendekatan komunikasi risiko menekankan komunikasi dua arah (konvergen), kepercayaan, keterbukaan informasi, serta keterlibatan aktif masyarakat. Komunikasi yang bersifat top-down cenderung gagal membangun kesepahaman dan perubahan

perilaku, terutama dalam konteks karhutla yang sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan praktik masyarakat lokal.

Masalah Penelitian

Meskipun kebijakan pengendalian karhutla dan pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA) telah dibentuk di Aceh sejak 2019, praktik karhutla masih terus berulang, khususnya di Kabupaten Aceh Barat. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam praktik komunikasi risiko antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemahaman masyarakat terhadap risiko karhutla sering kali tidak sejalan dengan tingkat bahaya yang ada, sementara koordinasi antar lembaga masih lemah dan lebih berorientasi pada pemadaman daripada pencegahan. Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji kesenjangan komunikasi risiko antara para stakeholder dalam upaya pencegahan karhutla di Aceh, khususnya pada level lokal.

Tujuan Penelitian

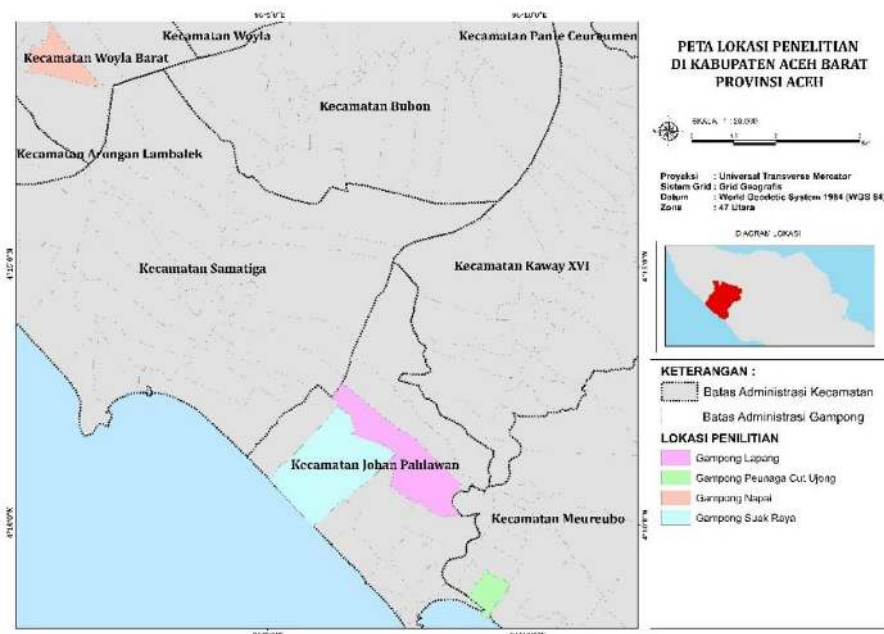
Penelitian ini bermaksud menjelaskan situasi yang terjadi pada praktik komunikasi risiko dalam upaya pencegahan terjadinya kasus karhutla di Provinsi Aceh serta bentuk kesenjangan yang terjadi didalamnya. Pertanyaan yang menjadi pembahasan utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Karhutla dimaknai oleh para stakeholder yang terlibat, dan bagaimana praktik komunikasi risiko serta kesenjangan apa saja yang terjadi pada upaya pencegahan karhutla di Provinsi Aceh khususnya Kabupaten Aceh Barat”.

Tujuan dari penelitian ini adalah akan menganalisis pemahaman mengenai karhutla yang dimiliki para stakeholder yang terlibat di Kabupaten Aceh Barat, Menganalisis praktik komunikasi risiko dalam upaya pencegahan karhutla yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat, serta akan Menganalisis bentuk kesenjangan komunikasi yang terjadi diantara para stakeholder yang terlibat dalam upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat. Harapannya penelitian ini akan menghasilkan analisis yang mendalam mengenai praktik komunikasi risiko pada tingkat pemangku kepentingan dan masyarakat sehingga dapat membentuk sebuah sistem komunikasi risiko lingkungan pada pengendalian karhutla yang juga melibatkan banyak aktor didalamnya.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, khususnya embedded single case design, untuk menggali secara mendalam praktik komunikasi risiko dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) antara pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat di Provinsi Aceh. (Creswell, 2016).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kabupaten Aceh Barat, wilayah yang secara konsisten mengalami karhutla, terutama pada kawasan lahan gambut yang rentan terbakar akibat praktik pembukaan lahan dengan cara membakar dan diperparah oleh musim kemarau ekstrem. Pemilihan lokasi juga didasarkan pada keberadaan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang dibentuk oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Aceh melalui UPTD KPH Wilayah IV.



Gambar 1. Lokasi Penelitian

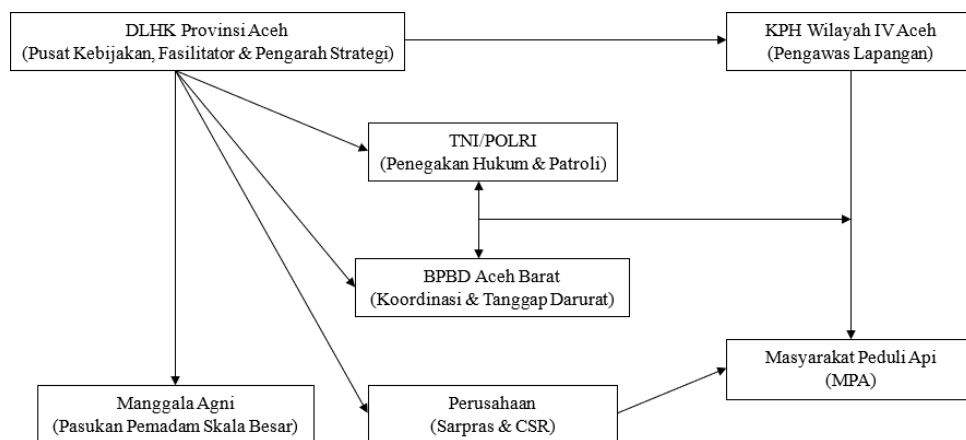
Penelitian dilakukan pada bulan April hingga Juli 2024 dengan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama pengumpulan data sekunder meliputi penelusuran dokumen dan data yang terkait dengan kasus karhutla di Kabupaten Aceh Barat serta upaya pencegahannya. Seluruh data dianalisis menggunakan conversation analysis terhadap hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan proses yang mencakup transkripsi percakapan, pengelompokan topik risiko dan pencegahan karhutla, serta pengkodean sistematis berdasarkan enam elemen komunikasi risiko yakni proses interaktif antar pemangku kepentingan, pertukaran informasi, perbedaan pemahaman, konstruksi makna risiko, produksi pesan, dan praktik manajemen risiko yang seluruhnya didukung oleh perangkat lunak NVivo 12.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pemaknaan Karhutla oleh Para Aktor yang Terlibat dalam Komunikasi Risiko Pencegahan Karhutla

Upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat tidak terlepas dari peran para aktor sebagai pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan perlu mempertimbangkan kompleksitas upaya pengendalian karhutla yang disertai dengan penerapan regulasi yang tepat, penegakan hukum yang adil, penyelesaian konflik lahan yang efektif, dan penguatan aspek komunikasi (Waluyo et al. 2024). Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam komunikasi risiko upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat disajikan dalam Gambar 2.



Gambar 2. Aktor yang terlibat dalam komunikasi risiko pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat

Para aktor ini tidak hanya berperan dalam pencegahan, tetapi juga terlibat langsung dalam pemadaman kebakaran di lapangan, yang idealnya didukung oleh sumber daya manusia terlatih dan peralatan memadai. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci, karena pembangunan berbasis masyarakat mensyaratkan partisipasi aktif sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, sehingga masyarakat menjadi bagian dari sistem pencegahan karhutla (Nurdin et al., 2018).

MPA Sebagai Garda Terdepan Pencegahan dan Respons Awal Karhutla di Tingkat Tapak

Sebagai salah satu upaya dalam bentuk penanganan bersama dan pencegahan terjadinya karhutla di Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dibentuklah kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA). Terdapat beberapa desa yang sudah memiliki kelompok MPA di Kabupaten Aceh Barat yang bertugas dibawah naungan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah IV Aceh. Kelompok MPA ini dibentuk dengan tujuan membantu KPH Wilayah IV untuk dapat memberikan informasi kepada personil KPH Wilayah IV atau instansi terkait lainnya terhadap indikasi maupun informasi mengenai terjadinya karhutla di desanya, serta dapat ikut berpartisipasi melakukan upaya pemadaman. Melalui pembentukan kelompok MPA ini juga diharapkan dapat membantu melakukan upaya preventif dalam rangka pencegahan karhutla dengan melakukan penyuluhan dan memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai karhutla yang dapat terjadi di desa mereka.

Pembentukan MPA secara nasional sudah terjadi sejak tahun 1997 sebagai bagian dari strategi pengendalian karhutla berbasis masyarakat. Kemudian dasar hukum mengenai MPA ini lebih lengkapnya diatur dalam Permen LHK No. 32 Tahun 2016. Pembentukan kelompok MPA di Kabupaten Aceh Barat diawali dengan sosialisasi pembentukan MPA untuk pencegahan karhutla yang diadakan oleh DLHK Aceh di Kabupaten Aceh Barat.

Adapun teknis pembentukan kelompok MPA diserahkan kepada masing-masing *gampong* oleh KPH. Namun tentu saja terdapat perbedaan dalam

pembentukan maupun pelaksanaan tugas MPA pada masing- masing *gampong*. Berikut merupakan rangkuman yang menjelaskan kondisi mengenai penyebab terjadinya karhutla, kendala yang dialami pada saat penanganan karhutla dan dampak yang dialami oleh kelompok MPA di *gampongnya* masing-masing sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Penyebab, kendala dan dampak karhutla berdasarkan hasil wawancara dengan informan di masing-masing *gampong* lokasi penelitian

	MPA <i>Gampong</i> Lapang	MPA <i>Gampong</i> Napai	MPA <i>Gampong</i> Peunaga Cut Ujong	MPA <i>Gampong</i> Suak Raya
Penyebab Terjadi Karhutla				
Pembakaran lahan dengan sengaja	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Membuang puntung rokok	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Membakar sampah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Pembukaan lahan baru	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Pemburu dari luar <i>gampong</i>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	-
Kendala Penanganan Karhutla				
Sumber air sulit didapatkan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Hambatan prosedural	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Hambatan akses ke lokasi karhutla	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Pendanaan	<input type="checkbox"/>	-	-	-
Minimnya sarana pemadaman	-	<input type="checkbox"/>	-	-
Dampak Karhutla				
Kesehatan masyarakat	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Keselamatan masyarakat	-	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>
Kerusakan lingkungan	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Ekonomi	-	-	-	<input type="checkbox"/>
Melintasi desa	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sumber: Data diolah dengan Nvivo 12

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa beberapa perilaku masyarakat lokal seperti membuang puntung rokok di sekitar kawasan hutan dan membakar sampah menjadi faktor umum penyebab terjadinya karhutla. Kedua penyebab ini menjadi permasalahan yang dialami oleh keempat *gampong* lokasi penelitian. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran dan kebiasaan kurang disiplin oleh masyarakat dapat menyebabkan risiko memicu timbulnya api. Selain itu faktor eksternal seperti pembukaan lahan baru dan kegiatan berburu yang dilakukan oleh para pendatang dari luar *gampong* juga menjadi faktor penyebab yang memperbesar potensi terjadinya karhutla. Hal ini menunjukkan adanya perubahan tata guna lahan dan dimensi struktural berupa tekanan ekonomi di *gampong* Suak Raya yang tidak terlalu terlihat di *gampong* lain.

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa setiap *gampong* memiliki kendala spesifik, namun masalah umum yang terjadi adalah berupa akses terhadap sumber daya baik berupa air, dana, maupun sarana. Kendala sulitnya mendapatkan sumber

air terjadi di tiga gampong, hal ini menunjukkan adanya kendala utama keterbatasan teknis dalam proses pemadaman karhutla. Kendala lainnya berupa hambatan logistik seperti akses lokasi dan ketersediaan dana juga menjadi penghambat dalam kegiatan penanganan karhutla. Hambatan akses menuju lokasi kebakaran terjadi di gampong Suak Raya yang mengindikasikan kondisi geografis yang sulit dijangkau dan seringkali disebabkan oleh besarnya skala kebakaran yang terjadi. Hal ini menjelaskan bahwa meskipun setiap gampong menghadapi keterbatasan sumber daya, namun jenis kendala antar gampong dapat berbeda sesuai kondisi lokal masing-masing gampong.

Karhutla yang terus terjadi hampir setiap tahunnya ini juga memberikan dampak bagi masyarakat sekitar. Dampak paling berat ditemukan gampong di Suak Raya, karena mencakup kelima aspek yang disebutkan, berupa kesehatan, keselamatan, kerusakan lingkungan, ekonomi, dan melintasi perbatasan desa. Dampak yang selama ini terasa langsung oleh masyarakat adalah dampak kesehatan dan keselamatan. Kabut asap yang dihasilkan dari kebakaran hutan menyebabkan gangguan pernafasan, gangguan penglihatan, dan bahkan dapat mengurangi jarak pandang. Faktor keselamatan masyarakat yang turun ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api juga menjadi prioritas penting yang perlu diperhatikan karena seringkali besarnya kebakaran tidak dapat diprediksi dalam waktu tertentu. Dampak yang terjadi hampir di semua lokasi penelitian adalah kebakaran yang melintasi antar desa. Hal ini terjadi karena kebakaran yang terjadi seringkali tidak dapat dikontrol sehingga berakibat kebakaran tidak hanya terbatas pada wilayah sumber api. Selain itu dengan adanya kegiatan pembukaan lahan dengan cara tebang habis dan pembakaran menyebabkan kebakaran tidak hanya terjadi pada lokasi yang sudah disiapkan untuk pengembangan tanaman industri atau perkebunan, melainkan dapat meluas ke wilayah lainnya termasuk wilayah sekitar gampong masyarakat (Rasyid 2014).

Berdasarkan hasil analisis perbandingan penyebab, kendala, dan dampak karhutla di masing-masing gampong lokasi penelitian ini menunjukkan bahwa upaya komunikasi risiko dan strategi pencegahan karhutla tidak dapat menggunakan pendekatan yang seragam. Di gampong dengan faktor penyebab berbasis perilaku (Lapang, Napai, Peunaga Cut Ujong), program edukasi dan penyuluhan mengenai bahaya puntung rokok, pengelolaan sampah tanpa pembakaran, serta peningkatan kapasitas MPA menjadi prioritas. Sementara di gampong Suak Raya, pendekatan harus lebih struktural dengan penegakan hukum terhadap pembakaran lahan, pengaturan tata guna lahan, dan peningkatan akses infrastruktur menuju kawasan rawan karhutla. Dengan demikian, strategi komunikasi risiko perlu disesuaikan dengan konteks lokal untuk menghasilkan efektivitas yang lebih besar dalam pencegahan karhutla.

Perbedaan tugas dan peran dari masing-masing aktor yang terlibat dalam upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat ini dalam dirangkum dalam Tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2 Peran masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat

Peran	Pemangku Kepentingan						
	DLHK	KPH	Manggala Agni	BPBD	TNI/Polri	Perusahaan	MPA
Penyusunan regulasi & SOP penanganan karhutla	●	-	-	-	-	-	-
Penegakan hukum	○	-	-	-	●	-	-
Tanggung jawab administratif & strategis	●	○	-	-	-	-	-
Pendampingan teknis	●	-	-	●	-	-	-
Pelatihan teknis & edukasi	●	●	-	●	●	-	○
Pengawasan lapangan secara rutin	-	●	-	-	●	●	●
Pendataan penanggung jawab lahan	-	○	-	-	●	-	●
Penyediaan sarpras tanggap darurat	○	-	●	●	-	○	-
Eksekutor pemadam kebakaran	-	●	●	●	●	○	●
Melaporkan kondisi awasan hutan	●	●	-	-	○	-	●

Praktik Komunikasi Risiko dalam Upaya Pencegahan Karhutla

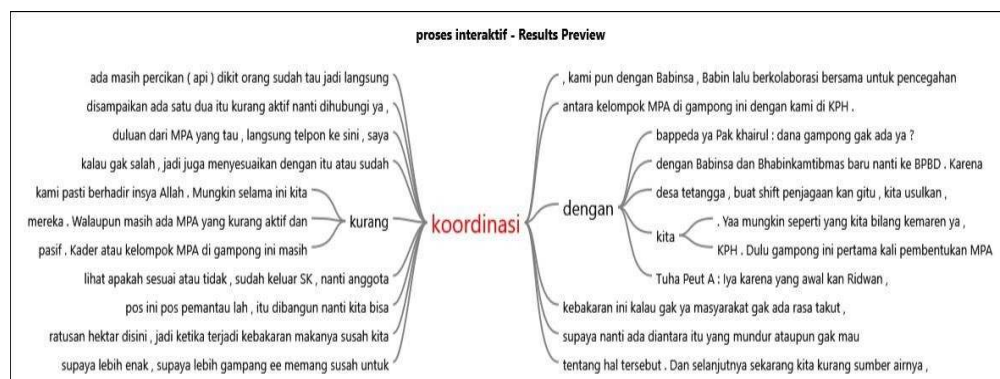
Komunikasi risiko dalam pencegahan karhutla dilakukan melalui berbagai saluran, baik formal maupun informal. Saluran formal meliputi rapat koordinasi lintas instansi, sosialisasi kebijakan, serta patroli terpadu. Sementara itu, saluran informal mencakup komunikasi interpersonal dan penggunaan media komunikasi digital seperti grup WhatsApp. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi risiko melalui saluran formal cenderung bersifat satu arah dan prosedural. Informasi risiko disampaikan dalam bentuk instruksi, peringatan, atau laporan, dengan ruang dialog yang terbatas. Pola komunikasi ini menempatkan masyarakat sebagai penerima informasi, bukan sebagai aktor yang berkontribusi dalam pengelolaan risiko.

Saluran informal memberikan ruang komunikasi yang lebih fleksibel, namun tidak terintegrasi secara sistematis dalam kerangka pencegahan karhutla. Informasi yang disampaikan melalui komunikasi informal sering kali bersifat situasional dan bergantung pada relasi personal antar aktor. Secara keseluruhan, pola komunikasi risiko yang berkembang masih bersifat reaktif, yakni intensif ketika ancaman karhutla meningkat, namun melemah pada fase pra-musim kemarau. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi risiko belum menjadi proses berkelanjutan yang terintegrasi dalam strategi pencegahan karhutla.

1) *Proses Interaktif*

Komunikasi risiko menekankan komunikasi dua arah antara para stakeholder yang terlibat dalam risiko. Dan tentunya Proses interaktif akan memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi yang terjadi pada masyarakat terutama yang berada di wilayah sekitar hutan dan lahan. Beberapa bentuk proses interaktif yang telah diterapkan dalam upaya pencegahan karhutla adalah seperti adanya kampanye atau sosialisasi mengenai bahaya karhutla, penyebab terjadinya karhutla, langkah-langkah pencegahan, dan pemahaman aturan hukum mengenai karhutla. Nurdin et al. (2018)

Berdasarkan gambar wordtree hasil analisa menggunakan Nvivo 12 pada penelitian ini menyebutkan bahwa proses interaktif di *gampong* lokasi penelitian juga dimaknai dengan proses koordinasi, pemaknaan proses koordinasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.



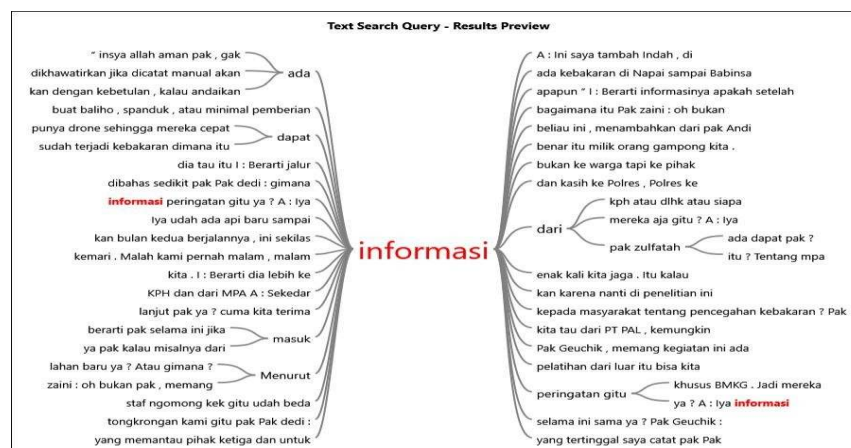
Gambar 4. wordtree pemaknaan kata “koordinasi” oleh para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat

Proses interaktif dimaknai dengan kegiatan dimana peran antar pemangku kepentingan mengalami proses partisipatif, terjadinya kolaborasi, dan keterlibatan aktif yang memberikan respon timbal balik. Proses koordinasi ini menjelaskan bahwa praktik komunikasi risiko berupa proses interaktif dapat memberikan efek saling mempengaruhi. Hal ini menggambarkan bagaimana keputusan satu pihak dapat memberikan pengaruh kepada pihak lainnya. Proses interaktif ini juga dapat menjelaskan bagaimana hubungan antar pemangku kepentingan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat dalam komunikasi risiko dalam upaya pencegahan karhutla. Sesuai dengan gambar wordtree di atas dapat diketahui bahwa masih terdapat beberapa hambatan dalam proses koordinasi antar pemangku kepentingan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah masih kurangnya koordinasi antara kelompok MPA ataupun pihak *gampong* dengan KPH.

2) Pertukaran Informasi

Proses pertukaran informasi dalam komunikasi risiko merupakan proses interaktif yang melibatkan individu, kelompok, dan lembaga dengan peran, pengalaman, serta pengetahuan yang berbeda dalam memahami risiko terhadap manusia dan lingkungan (Aristyavani, 2021). Perbedaan informasi ini membentuk variasi persepsi risiko, namun melalui pertukaran informasi yang dialogis dapat dibangun pemahaman bersama, kepercayaan antar aktor, serta dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan penanganan risiko.

Dalam pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat, pertukaran informasi berlangsung secara formal dan informal, terutama melalui pertemuan semi formal antara BPBD, KPH, MPA, dan masyarakat *gampong*. Proses ini memungkinkan integrasi pengetahuan teknis dari institusi dengan pengalaman lokal masyarakat, selama informasi yang disampaikan relevan, akurat, dan mudah dipahami (Aristyavani, 2021). Hal ini perlu diperhatikan untuk mengelola informasi yang akan dijadikan sebagai bahan rujukan pengambilan keputusan kebijakan maupun aksi yang akan dilakukan dalam kegiatan pencegahan dan penanganan karhutla. Pemaknaan informasi oleh para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. wordtree pemaknaan informasi oleh para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan gambar wordtree diatas menunjukkan sebaran pemaknaan informasi yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat. Alur pertukaran informasi sering kali bersifat berlapis dan kompleks. Informasi penting seperti deteksi titik api umumnya tidak disampaikan langsung kepada masyarakat atau MPA, melainkan melalui rantai aktor mulai dari perusahaan, kepolisian, aparat gampong, hingga MPA. Pola komunikasi berjenjang ini menunjukkan bahwa pertukaran informasi dalam komunikasi risiko karhutla bersifat multi-arah dan melibatkan banyak aktor sekaligus, dengan tujuan membentuk pemahaman kolektif dan memperkuat kapasitas bersama dalam pencegahan dan penanganan karhutla.

3) Banyak Informasi

Berdasarkan masing-masing aktor yang terlibat dalam upaya pencegahan Keterlibatan berbagai aktor dalam pencegahan karhutla menghasilkan keragaman informasi yang bersumber dari pengalaman, data, dan kepentingan yang berbeda. Masyarakat cenderung memahami risiko berdasarkan pengalaman langsung di lingkungan sekitar, sementara pemerintah melihat risiko melalui data dan pemantauan dari berbagai wilayah. Perbedaan sumber informasi ini berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan dalam memahami risiko karhutla.

Banyaknya informasi dalam komunikasi risiko ini dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat, terlebih jika informasi yang didapatkan tidak selaras. Misalnya informasi yang diberikan oleh pihak pemerintah pusat berbeda dengan yang informasi yang diperoleh di lapangan. Oleh karena perbedaan informasi yang tidak sesuai dengan realitas dilokasi ini kemudian dapat menyebabkan munculnya potensi ketidakpercayaan kepada pemberi informasi dalam hal ini adalah pihak pemerintah. Selain itu tantangan lainnya dari banyaknya informasi ini adalah munculnya potensi hoaks yang dapat tersebar cepat jika tidak segera ditangani.

Oleh karena itu komunikasi risiko menjelaskan semakin banyak informasi yang tersedia maka semakin penting komunikasi yang efektif untuk menyaring, menjelaskan, dan menyampaikan informasi yang benar dan relevan. Pada konteks pencegahan karhutla, dengan adanya komunikasi risiko dapat menjadi jembatan penghubung antara berbagai sumber informasi agar masyarakat dapat bertindak berdasarkan informasi yang benar dan mencegah timbulnya kebingungan atau asumsi tak berdasar.

4) Risiko sebagai Konstruksi

Dalam komunikasi risiko, para aktor yang terlibat dapat memahami risiko secara berbeda, tergantung pada latar belakang sosial, pengetahuan, serta pengalaman masing-masing. Sejalan dengan konsep *risk as a social construction*, risiko tidak semata-mata dipahami sebagai ancaman objektif yang bersifat ilmiah, melainkan juga sebagai hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh persepsi, nilai, budaya, pengalaman historis, dan interaksi sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan pengamatan anggota Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), praktik pembukaan lahan dengan cara membakar masih dianggap sebagai metode yang mudah dan murah oleh masyarakat. Aktivitas ini hanya membutuhkan peralatan sederhana seperti barang bekas, bahan bakar, dan sumber api. Selain itu,

praktik membakar lahan telah menjadi bagian dari tradisi turun-temurun sehingga sulit diubah. Hal ini disampaikan oleh Jul Rahmady, Sekretaris DLHK Provinsi Aceh: *“dan modus kebakaran lahan sekarang ini kan gampang, mereka modalnya bahan bekas, jadi sangat-sangat murah, setelah dikumpulin semua barang bekas langsung dibakar dan merambat ke area lahan, kalau perlu umpan (api) paling berapa, gampang terbakar apalagi dengan suhu panas ini kan gampang terbakar”*

Pembakaran secara sengaja ini juga diketahui masih dilakukan sebagai cara alternatif pembukaan lahan sawit. Masyarakat maupun perusahaan masih kerap melakukan praktik alih fungsi lahan dari tanaman hutan menjadi tanaman perkebunan kelapa sawit atau jenis tanaman lainnya dengan cara membakar dengan sengaja. Tidak sedikit masyarakat lokal yang menganggap membuka lahan dengan cara dibakar ini bukanlah merupakan sebuah tindakan berisiko, karena sudah dilakukan secara turun-temurun dan dianggap cukup efisien. Hal ini menjelaskan masyarakat memahami risiko bukan dari sisi bahaya ataupun kemungkinan terjadinya kebakaran. Ada konstruksi sosial yang menganggap praktik membakar sampah itu aman jika dilakukan dengan cara tertentu, sehingga mengesampingkan kemungkinan bahaya yang dapat terjadi.

5) Pesan

Elemen pesan merupakan inti dari proses komunikasi risiko, karena pesan menjadi media penghubung antara pemberi dan penerima informasi serta berperan penting dalam membentuk persepsi, sikap, dan tindakan terhadap risiko. Menurut Aristyavani (2021), pesan dalam komunikasi risiko agar efektif harus memenuhi beberapa kriteria, yakni berbasis pada data yang akurat, disampaikan secara jelas dan mudah dipahami tanpa istilah teknis yang membingungkan, relevan dengan kebutuhan audiens, tepat waktu, serta berasal dari sumber yang kredibel dan dapat dipercaya.

Dalam konteks komunikasi risiko pencegahan karhutla, elemen pesan mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami ancaman yang dihadapi. Proses pertukaran informasi ini memunculkan pesan berupa kekhawatiran dan ancaman. Pesan kekhawatiran umumnya disampaikan oleh pihak yang secara langsung terdampak risiko. Salah satu bentuk kekhawatiran tersebut disampaikan oleh anggota Masyarakat Peduli Api (MPA) Gampong Peunaga Cut Ujong terkait potensi kebakaran pada musim kemarau: *“itu (spanduk peringatan larangan membakar hutan) lokasinya yang memang banyak diakses masyarakat, dengan tujuan spanduk itu bisa dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Itu untuk mengantisipasi di musim kemarau seperti sekarang ini. Ini kami sudah mulai was-was ini, kami sudah merasa panik ini”*

Pesan yang disampaikan oleh perangkat gampong dan MPA tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat telah memiliki kesadaran terhadap risiko karhutla. Risiko yang dimaksud tidak hanya mencakup potensi kebakaran hutan dan lahan, tetapi juga dampaknya terhadap kesehatan, keselamatan, kerusakan ekosistem, serta gangguan terhadap perekonomian masyarakat.

Sebagai bentuk respons, MPA bersama perangkat gampong berupaya mengubah kekhawatiran tersebut menjadi tindakan preventif dengan memasang spanduk larangan membakar hutan. Spanduk tersebut memuat pesan peringatan

mengenai bahaya karhutla, dampak yang ditimbulkan, serta ancaman sanksi hukum bagi pelaku pembakaran lahan. Hal ini juga ditegaskan oleh Jul Rahmady: *"harus ada ancaman, makanya spanduk itu sebagai alat peraga tadi kita tetap cantumkan ancaman misalnya 2 tahun penjara dengan harus bayar sekian"*

Ancaman dalam pesan ini dimaksudkan sebagai bentuk pengingat dan upaya menumbuhkan kesadaran masyarakat. Namun, Aristyavani (2021) menekankan bahwa pesan ancaman harus disampaikan secara proporsional, tidak bersifat menakut-nakuti secara berlebihan, tetapi mampu mendorong kewaspadaan dan kesiapsiagaan. Pesan yang efektif seharusnya disertai solusi konkret, misalnya alternatif pembukaan lahan tanpa bakar, sehingga masyarakat memiliki pilihan tindakan yang lebih aman.

Bagi kelompok MPA, pesan yang berasal dari pakar atau akademisi dinilai efektif dalam menjelaskan aspek teknis karhutla, namun cenderung kurang berdampak apabila tidak didukung oleh sumber lokal yang dipercaya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun informasi ilmiah tersedia, aktor lokal memiliki peran strategis dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap pesan risiko (Bradley et al., 2014; Asfaw et al., 2019).

6) *Manajemen Risiko*

Manajemen risiko merujuk kepada tindakan yang dirancang untuk mengidentifikasi, menilai, mengurangi, dan mengendalikan risiko. Manajemen risiko juga bermaksud mengkomunikasikan tindakan-tindakan tersebut kepada pihak yang berisiko atau yang berkepentingan. Oleh karena adanya keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan ini serta adanya bermacam interpretasi serta pesan (informasi) untuk menanggulangi risiko tersebut dibutuhkan sebuah manajemen risiko. Aristyavani (2021) menyebutkan manajemen risiko dalam komunikasi risiko harus mampu mendukung upaya identifikasi risiko, menyamakan persepsi diantara para pemangku kepentingan mengenai risiko, membantu masyarakat memahami langkah mitigasi yang dapat dilakukan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap risiko.

Komunikasi risiko tidak hanya berfungsi memberi informasi, tetapi juga bertujuan untuk menggerakkan tindakan nyata. Dengan adanya informasi yang jelas dapat membantu para pengambil kebijakan menentukan langkah mitigasi yang tepat. Sebagai alat pendukung strategi pencegahan karhutla, manajemen risiko berarti mengelola ancaman kebakaran secara terencana dan partisipatif. Menurut Aristyavani (2021) komunikasi dalam manajemen risiko dapat dilakukan dengan melalui tiga tahap besar, yaitu (1) pra-risiko atau sebelum terjadi kebakaran, (2) saat risiko terjadi berupa respon darurat, dan (3) pasca-risiko yaitu setelah kebakaran.

Berdasarkan hasil analisis wawancara menggunakan Nvivo 12 menunjukkan penggunaan grup WhatsApp menjadi salah satu sarana yang kerap dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam penanganan karhutla di Kabupaten Aceh Barat seperti yang dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Wordtree hasil analisis penggunaan grup WhatsApp sebagai media komunikasi antar aktor dalam penanganan karhutla di Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan gambar wordtree diatas menjelaskan bahwa grup WhatsApp membantu menghubungkan beberapa aktor yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dengan adanya grup WhatsApp ini membantu menyebarkan informasi titik api dengan cepat dari sumber resmi maupun hasil pantauan MPA di lapangan. Melalui grup ini juga informasi dapat segera direspon oleh pihak terkait tanpa harus menunggu jalur birokrasi formal yang kerap memakan waktu cukup lama. Hal ini dapat mengurangi waktu tanggap (response time) dan mencegah api meluas. Grup WhatsApp ini juga menjadi satu media komunikasi yang sama, dimana semua pihak dapat memantau perkembangan situasi secara bersamaan, sehingga mengurangi miskomunikasi dan memastikan tindakan bersama lebih terarah.

Kesenjangan Peran dan Persepsi Antar Stakeholder dalam Komunikasi Risiko Pencegahan Karhutla

Awalnya komunikasi risiko dikembangkan sebagai sarana untuk mempelajari bagaimana solusi atau jalan keluar terbaik dari para ahli untuk dapat disampaikan kepada publik. Hal ini dilakukan untuk menjembatani perbedaan persepsi antara publik dengan penilaian ahli. Seiring berjalannya waktu, tujuan mendidik masyarakat mengenai risiko pada komunikasi risiko kini telah berubah dan lebih dibutuhkan sebagai posisi alternatif. (Plough dan Krinsky 1987; Renn dan Walker 2008).

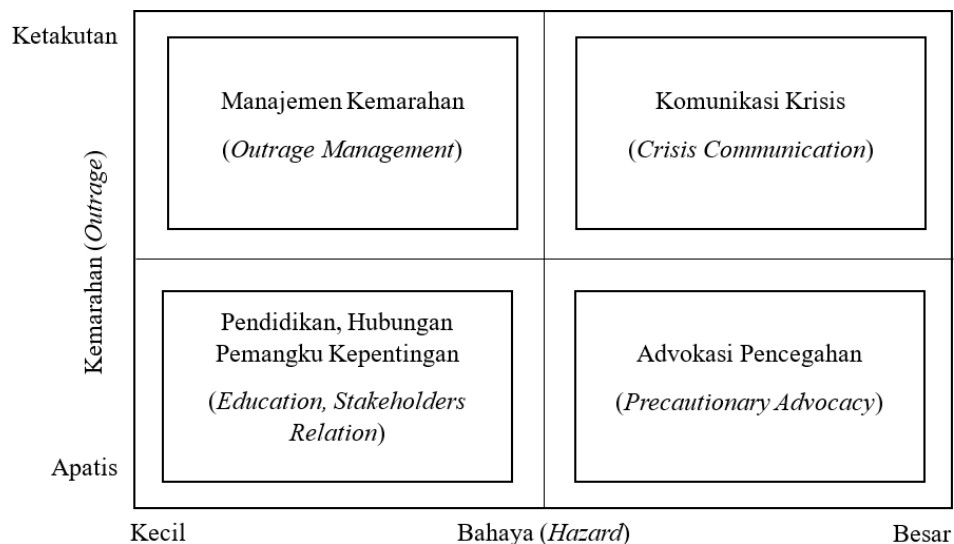
Pada proses komunikasi risiko yang melibatkan berbagai stakeholder ini dapat terjadi perbedaan-perbedaan dan menimbulkan bentuk kesenjangan seperti perbedaan persepsi, peran, kepentingan, kapasitas, dan komunikasi antar pihak yang terlibat. Kesenjangan ini terjadi karena adanya ketimpangan peran atau ketidaksesuaian tujuan antar stakeholder. Salah satu contoh kesenjangan yang terjadi misalnya berdasarkan hasil wawancara yang terlihat pada praktik penanganan karhutla di gampong Lapang. Terlihat adanya kesenjangan peran dan persepsi antara aktor desa dan pemerintah Kabupaten, seperti yang diungkapkan oleh Geuchik gampong Lapang sebagai berikut: *"kalau kami di gampong ini sudah sering kami sampaikan ke warga, jangan bakar, apalagi dekat hutan. Tapi bantuan atau pendampingan dari atas kadang nggak jelas kapan datangnya"*

Pernyataan ini menunjukkan adanya gap koordinasi dan keterbatasan dukungan dari pemerintah daerah kepada aparat gampong, meskipun tanggung jawab pencegahan karhutla telah dibebankan kepada mereka. Sementara itu, ketua MPA gampong Lapang juga menyatakan: *“kami ini disuruh jaga api, tapi alat tidak cukup, bahkan baju APD pun harus cari sendiri. Kadang-kadang kami merasa seperti tidak dianggap penting”*

Ungkapan ini mencerminkan gap dalam kapasitas dan pengakuan peran, di mana MPA sebagai aktor kunci di lapangan justru menghadapi keterbatasan logistik dan minimnya perhatian dari stakeholder yang lebih tinggi. Kesenjangan ini semakin diperparah oleh perbedaan persepsi risiko; bagi MPA dan masyarakat, karhutla sering dianggap sebagai kejadian musiman yang dapat ditangani secara lokal, sementara bagi pemerintah karhutla ini adalah bencana yang membutuhkan pendekatan struktural. Gap-gap ini menyebabkan lemahnya efektivitas kebijakan, memperlambat respons, dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penanggulangan karhutla secara keseluruhan.

Selain itu, kesenjangan juga terjadi di internal pemerintah, khususnya antara DLHK dan KPH. Perbedaan pembagian peran antara pembuat kebijakan dan pelaksana teknis, yang tidak diimbangi dengan sumber daya dan anggaran memadai, berdampak pada lemahnya pembinaan MPA dan kualitas komunikasi risiko kepada masyarakat. Perbedaan persepsi risiko antara masyarakat yang memandang karhutla sebagai kejadian musiman dan pemerintah yang melihatnya sebagai bencana struktural semakin memperlebar kesenjangan tersebut.

Secara keseluruhan, kesenjangan peran, persepsi, dan kapasitas antar aktor ini menurunkan efektivitas komunikasi risiko, memperlambat respons penanganan karhutla, serta berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pencegahan karhutla. Variasi tingkat keaktifan MPA di setiap gampong menunjukkan bahwa praktik komunikasi risiko di Kabupaten Aceh Barat masih bersifat tidak merata dan dipengaruhi oleh dinamika hubungan antar pemangku kepentingan, sebagaimana dapat dipetakan melalui kerangka bahaya dan kemarahan (Sandman, 2003), Berikut :



Gambar 7. Kondisi Hubungan Bahaya dan Kemarahan

kesenjangan peran dan persepsi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Barat ini dapat dipetakan berdasarkan kuadran tingkat bahaya dan kemarahan (Gambar 7) menjadi (1) Pemerintah berada pada orientasi hazard-driven, yaitu pendekatan yang berfokus pada identifikasi dan pemahaman bahaya yang spesifik pada kasus karhutla untuk kemudian menentukan tindakan dan strategi yang diperlukan. Pendekatan ini fokus kepada kebijakan dan teknis penanganan, dan (2) MPA dan masyarakat berada pada orientasi outrage-driven, yaitu pendekatan yang menekankan bahwa persepsi publik terhadap risiko sering kali berbeda dari penilaian teknis, karena dipengaruhi oleh kepercayaan, pengalaman, nilai budaya, dan konteks sosial (Slovic 1987).

Sebagaimana dijelaskan oleh Badri (2018) ketidaksinkronan antara bahaya objektif dan kepedulian subjektif inilah yang menghasilkan gap komunikasi. Oleh karena itu efektivitas komunikasi risiko tidak hanya bergantung pada penyampaian informasi teknis, tetapi juga kemampuan menyatukan persepsi bahaya dan kepedulian sosial melalui interaksi dua arah antar pemangku kepentingan yang terlibat.

Pembahasan

Hasil Pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi risiko memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Aceh Barat, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural maupun kultural. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perbedaan pemaknaan risiko antar pemangku kepentingan menjadi akar utama ketidakefektifan komunikasi yang terbangun. Pemerintah, khususnya melalui DLHK dan KPH, cenderung memaknai karhutla sebagai bahaya lingkungan yang harus dikendalikan melalui pendekatan teknokratis, berbasis regulasi, dan pengendalian struktural. Sebaliknya, masyarakat dan kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) melihat karhutla sebagai bagian dari realitas sosial-ekonomi yang berkaitan erat dengan praktik pembukaan lahan, keterbatasan sumber daya, serta kebiasaan turun-temurun. Perbedaan konstruksi makna ini sejalan dengan konsep risk as a social construction yang menyatakan bahwa risiko tidak hanya bersifat objektif, tetapi juga dibentuk oleh pengalaman sosial, budaya, dan konteks lokal (Slovic, 1987). Dengan demikian, komunikasi risiko yang tidak mempertimbangkan dimensi sosial ini cenderung gagal membangun kesepahaman dan perubahan perilaku masyarakat.

Lebih lanjut, praktik komunikasi risiko yang berlangsung di Kabupaten Aceh Barat masih didominasi oleh pola komunikasi satu arah (top-down), terutama melalui saluran formal seperti rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan. Pola ini terbukti kurang efektif dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat karena menempatkan mereka hanya sebagai penerima informasi. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa komunikasi risiko yang efektif harus bersifat dialogis dan partisipatif, bukan sekadar penyampaian informasi (Sellnow et al., 2008). Dalam konteks ini, keberadaan saluran informal seperti grup WhatsApp sebenarnya menjadi potensi strategis dalam membangun komunikasi yang lebih responsif dan interaktif. Namun, pemanfaatannya masih terbatas pada pertukaran informasi darurat dan belum dioptimalkan sebagai ruang diskusi kolektif yang berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antara komunikasi formal dan informal masih belum terbangun secara sistematis dalam kerangka manajemen risiko.

Selain itu, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kompleksitas aktor yang terlibat dalam pencegahan karhutla menghasilkan keragaman informasi yang tidak selalu selaras. Perbedaan sumber informasi – antara pengetahuan teknis pemerintah dan pengalaman empiris masyarakat – seringkali menimbulkan kebingungan bahkan ketidakpercayaan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Aristyavani (2021) yang menekankan bahwa banyaknya informasi tanpa pengelolaan komunikasi yang efektif justru dapat memperbesar risiko misinformasi dan menurunkan kredibilitas sumber informasi. Oleh karena itu, komunikasi risiko harus mampu berfungsi sebagai mekanisme penyaring (*filtering mechanism*) yang menjembatani berbagai sumber informasi agar menjadi pesan yang konsisten, relevan, dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dari sisi implementasi di lapangan, peran MPA sebagai garda terdepan dalam pencegahan karhutla menunjukkan potensi besar dalam membangun sistem komunikasi berbasis komunitas. Namun, keterbatasan kapasitas, minimnya dukungan logistik, serta kurangnya pengakuan terhadap peran mereka menjadi hambatan serius. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan peran (*role gap*) yang berdampak pada rendahnya efektivitas koordinasi antar stakeholder. Temuan ini sejalan dengan penelitian Muttaqin et al. (2015) yang menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana sangat bergantung pada penguatan kapasitas masyarakat lokal sebagai aktor utama di tingkat tapak. Tanpa dukungan yang memadai, peran strategis MPA dalam komunikasi risiko tidak dapat berjalan optimal.

Kesenjangan lainnya yang teridentifikasi adalah perbedaan persepsi risiko antara pemerintah dan masyarakat, yang dapat dijelaskan melalui kerangka *hazard versus outrage* (Sandman, 2003). Pemerintah cenderung berorientasi pada *hazard-driven approach* yang menekankan aspek teknis dan tingkat bahaya objektif, sementara masyarakat lebih dipengaruhi oleh *outrage-driven factors* seperti pengalaman, nilai budaya, dan tingkat kepercayaan. Ketidaksinkronan antara kedua perspektif ini menyebabkan terjadinya *gap komunikasi* yang berdampak pada rendahnya efektivitas pesan risiko. Oleh karena itu, komunikasi risiko yang efektif harus mampu mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut agar pesan yang disampaikan tidak hanya akurat secara ilmiah, tetapi juga relevan secara sosial dan emosional.

Dalam konteks manajemen risiko, penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi risiko di Kabupaten Aceh Barat masih bersifat reaktif dan belum terintegrasi dalam siklus manajemen risiko secara menyeluruh, baik pada tahap pra-bencana, saat bencana, maupun pasca-bencana. Padahal, menurut IRGC (2017), komunikasi risiko seharusnya menjadi bagian integral dari *risk governance* yang berfungsi tidak hanya untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan, memperkuat kolaborasi, dan mendorong tindakan kolektif. Kurangnya evaluasi pasca-kejadian dan minimnya pembelajaran kolektif (*risk learning*) juga menjadi indikator bahwa sistem komunikasi risiko belum berkembang menjadi budaya risiko (*risk culture*) yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas komunikasi risiko dalam pencegahan karhutla sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola perbedaan persepsi, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta membangun partisipasi masyarakat secara aktif. Pendekatan komunikasi yang bersifat konvergen, partisipatif, dan kontekstual menjadi kunci dalam menjembatani kesenjangan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan transformasi strategi komunikasi risiko dari yang semula bersifat informatif menjadi transformatif, yakni mampu mengubah cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap risiko karhutla. Hal ini juga didukung oleh Bradley et al. (2014) yang menyatakan bahwa komunikasi risiko yang efektif harus mampu mempengaruhi perilaku melalui kombinasi informasi yang akurat, keterlibatan emosional, dan kepercayaan terhadap sumber informasi.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pihak pemerintah yang terkait yaitu DLHK dan KPH memaknai karhutla sebagai bahaya lingkungan yang harus dikendalikan melalui kebijakan dan regulasi. Sebaliknya, MPA dan masyarakat memaknai karhutla sebagai ancaman sosial-ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas pembukaan lahan, musim kemarau, dan keterbatasan akses terhadap alat atau teknologi pencegahan. Perbedaan makna ini berpengaruh terhadap cara mereka berkomunikasi dan berkoordinasi di lapangan.

Praktik komunikasi risiko dalam upaya pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat berjalan melalui mekanisme koordinasi formal (rapat atau pertemuan antar lembaga dan patroli terpadu) dan informal (grup WhatsApp, komunikasi langsung antar anggota MPA dan KPH). Namun komunikasi dua arah masih terbatas, di mana informasi masih sering bersifat satu arah dari pemerintah kepada masyarakat. Grup WhatsApp berperan penting dalam penyebaran informasi dini, tetapi belum berfungsi optimal sebagai wadah diskusi partisipatif.

Kesenjangan komunikasi antar pemangku kepentingan di Kabupaten Aceh Barat terjadi karena adanya perbedaan peran, persepsi risiko, dan tingkat kepercayaan antar aktor. Pemerintah mengedepankan sisi kebijakan dan kontrol, sedangkan masyarakat lebih menekankan aspek sosial. Kurangnya forum evaluasi bersama dan kegiatan edukasi pasca kebakaran menyebabkan rendahnya pembelajaran kolektif (*risk learning*). Akibatnya koordinasi lintas sektor masih bersifat reaktif dan belum membentuk budaya komunikasi risiko yang berkelanjutan (*risk culture*). Secara keseluruhan efektivitas komunikasi risiko dalam pencegahan karhutla di Kabupaten Aceh Barat belum optimal karena masih terdapat ketidaksinkronan antara pengetahuan teknis pemerintah dan persepsi sosial masyarakat terhadap risiko kebakaran.

Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian ini, dapat dibentuk beberapa saran yang dapat dipertimbangkan meliputi:

1. Bagi Pemerintah dan DLHK untuk perlu memperkuat komunikasi dua arah melalui forum konsultatif dan edukasi berbasis pengalaman lokal. Edukasi yang diberikan dapat menggunakan strategi komunikasi risiko yang

menggabungkan pendekatan hazard-driven dan outrage-driven, agar pesan teknis lebih kontekstual dengan kondisi masyarakat.

2. Bagi KPH dan kelompok MPA untuk meningkatkan peran sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, dengan memperluas fungsi kelompok yang tidak hanya pada kegiatan pemadaman, tetapi juga pada kegiatan edukasi risiko dan pencegahan dini.
3. Bagi masyarakat agar dapat menerapkan proses pengawasan jika melakukan pembakaran di sekitar wilayah hutan untuk mengurangi risiko terjadinya karhutla.

Bagi peneliti dan akademisi untuk selanjutnya diperlukan penelitian lanjutan yang menilai efektivitas komunikasi risiko lintas budaya dan kearifan lokal dalam membangun trust reconstruction antara pemerintah dan masyarakat, serta kajian lainnya yang dapat meneliti peran komunikasi digital dalam manajemen risiko bencana di tingkat tapak.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aristyavani I. 2021. *Komunikasi Risiko: Konsep, Teori, dan Strategi*. Bandung (ID): PT Remaja Rosdakarya.
- Bradley DT, Mc Farland M, Clarke M. 2014. The Effectiveness of Disaster Risk Communication: A Systematic Review of Intervention Studies. *PLOS Curr. Disasters*.:55–94.doi:10.1201/9781315365640-4.
- Cresswell JW. 2016. *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- IRCG. 2017. *Introduction to the IRGC Risk Governance Framework, revised version*. Lausanne EPFL Int. Risk Gov. Cent.:1–52.
- Irsadi A. 2016. Komunikasi Kebijakan Pemerintah Melahirkan Pelanggaran Dalam Kebakaran Hutan Dan Lahan. *J. Ilmu Komun. Source*. 2(2):45–61.
- Lomban AA, Jamalullail J. 2022. Komunikasi Risiko Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-Pb) Dalam Kesiapan Menghadapi Ancaman Bencana. *Nusant. J. Ilmu Pengetah. Sos*. 9(2):495–504.
- Maryudi A. 2016. Arah Tata Hubungan Kelembagaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Indonesia. *J. Ilmu Kehutan*. 10(1):57–64.doi:10.22146/jik.12632.
- Masriadi. 2017. Kebakaran Lahan Gambut, Kabut Asap Sampai di Lhokseumawe. *Kompas.com*.
- Miles MB, Huberman A M, Saldana J. 2014. *Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Moloeng LJ. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 21 (revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muttaqin, Husin T, Safrida. 2015. Peran Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan. *J. Ilmu Kebencanaan*. 2:28–34.
- Napitupulu SM, Mudian B. 2016. Pengelolaan sumber daya air pada lahan gambut yang berkelanjutan. Di dalam: *Proceedings ACES (Annual Civil Engineering Seminar)*. Vol. 1. hlm. 330–337.
- Negoro SH. 2021. Penerapan Komunikasi Risiko Bencana Pada The Cangkringan Jogja Villas & Spa. *WACANA J. Ilm. Ilmu Komun*. 20(2):159–170.

- Nurdin, Muhammad B, Sukartik D. 2018. Efektivitas Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan Pada Masyarakat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Riau. *Jurkom*. 1(1):70-87.
- Nurhaipah T. 2019. Komunikasi dalam hubungan akrab berdasarkan perspektif manajemen koordinasi makna. *J. Ilmu Komun. Efek*. 3(1):27-45.
- Permatasari TO, Sinduwiatmo K. 2024. Improving Disaster Response in Indonesia Through Culturally Integrated Communication Strategy. *J. Geosci. Environ. Stud*. 1(2):1-13. doi:10.53697/ijgaes.v1i2.3346.
- Qodriyatun SN. 2019. Kesiapan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dan Sumatera Selatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Restorasi Gambut. *Aspir. J. Masal. Sos*. 8(2):113-132.
- Rahmadi R. 2017. Api Berkobar di Lahan Gambut Aceh Barat, Bencana Tahunan yang Kembali Terulang. *Mongabay*.
- Rasyid F. 2014. Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan Fachmi Rasyid A. Pendahuluan. *J. Lingk. Widyaiswara*. 1(4):47-59.
- Sandman PM. 2003. Four Kinds of Risk Communication. *psandman.com*. Sandman PM, Miller PM, Johnson BB, Weinstein ND. 1993. Agency Communication, Community Outrage, and Perception of Risk: Three Simulation Experiments. *Risk Anal*. 13(6):585-598. doi:10.1111/j.1539-6924.1993.tb01321.x.
- Sapto. 2018. Sosialisasi Kajian Kebakaran Hutan dan Lahan Di Aceh Dalam Mendukung Perlindungan Lahan Gambut dan Pencegahan Kebakaran. *dlhk.acehprov.go.id*.
- Sari R, Hadi P. 2022. Pemanfaatan Media Sosial dalam Komunikasi Risiko Bencana di Tingkat Lokal. *J. Komun. Bencana*. 5(1):44-56.
- Schmid M, Hegg C. 2006. The role of science in the management of natural hazards and major risks: Scientific expertise in Switzerland and within International Geneva. National Platform for Natural Hazards (PLANAT).
- Sellnow TL, Ulmer RR, Seeger MW, Littlefield R. 2008. Effective risk communication: A message-centered approach. *Springer Science & Business Media*.
- Sigit R. 2016. Bentang Lahan Gambut: Kebakaran dan Sejarah Tata Kelolanya di Indonesia. *Mongabay*.:1-2.
- Suwondo S, Sabiham S, Sumardjo S, Paramudya B. 2012. Efek pembukaan lahan terhadap karakteristik biofisik gambut pada perkebunan kelapa sawit di kabupaten Bengkalis. *J. Natur Indones*. 14(1):143-149.
- Tata HL, Susmianto A. 2019. Prospek paludikultur ekosistem gambut Indonesia.
- Virmanto D. 2022. Kajian Beberapa Karakteristik Tanah Gambut Pada Di Perkebunan Kelapa Sawit. *XIX(2)*:43-52.
- Wahyudi M. 2021. Analisis Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Tengah. *J. Anterior*. 20(2):153-159.
- Wahyudi N, Anhar A, Farida A. 2023. Survei Kedalaman Gambut Di Desa Keub Kabupaten Aceh Barat. *J. Ilm. Mhs. Pertan*. 8(November):1122-1127.
- Waluyo BD. 2024. Forest and Land Fire: Indonesian Government's Homework on Communicating Environmental, Social and Legal Countermeasures in South Kalimantan. *JPPUMA J. Ilmu Pemerintah. dan Sos. Polit. Univ. Medan Area*. 12(1):1-9. doi:10.31289/jppuma.v12i1.11289.

- Waluyo EA, Lubis DP, Sadono D, Saharjo BH. 2024. Participatory Environmental Communication in Forest and Land Fire Control: a Case Study in South Sumatra Indonesia | Comunicação Ambiental Participativa No Controle De Incêndios Florestais E Terrestres: Um Estudo De Caso No Sul Da Sumatra, Indonésia | Com. Rev. Gest. Soc. e Ambient. 18(5):1-19.
- Widiatmoko WP, Astiani D, Muin S. 2022. Faktor Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Gambut Dan Upaya Pengendalian Masyarakat Di Lanskap Bentang Pesisir Padang Tikar Kabupaten Kubu Raya. J. Hutan Lestari. 10(4):901.doi:10.26418/jhl.v10i4.55548